

284

## Realitas Vox Populi, Vox Dei

Oleh Deden Koswara \*)

Jargon *Vox populi, vox dei* kembali bergema saat Sidang Tahunan MPR RI, yang berlangsung 1-10 Agustus 2002. Jargon ini terutama dikemukakan oleh mereka yang menolak amandemen UUD 1945, kecuali setelah adanya referendum terhadap rakyat. *Vox populi, vox dei* yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan merupakan istilah yang sudah mashur dalam masyarakat demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa pengakuan terhadap *Vox populi, vox dei*, dan tidak ada *Vox populi, vox dei* tanpa demokrasi.

Istilah *Vox populi, vox dei* hanya mungkin tumbuh dalam demokrasi, di karenakan sandaran utama demokrasi terletak pada pengakuan akan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Walaupun banyak orang memberi pengertian demokrasi secara berbeda, namun mereka sepakat bahwa dalam sistem demokrasi kedaulatan adalah di tangan rakyat, Rakyat dianggap sebagai penguasa mutlak dan pemilik kedaulatan, yang berhak mengatur urusannya sendiri, serta melaksanakan dan menjalankan kehendaknya sendiri, Rakyat tidak bertanggung jawab

kepada kekuasaan siapapun, selain kekuasaan rakyat. Rakyat berhak membuat peraturan dan undang-undang sendiri karena mereka adalah pemilik kedaulatan. Oleh karenanya wajar jika istilah *Vox populi, vox dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan) dimunculkan.

Pengertian standar tentang demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Demikian yang dikatakan Abraham Lincoln, *democracy is government of the people, by the people and for the people*, yang berbeda dengan kediktatoran, di mana pemerintahannya dari diktator, oleh diktator, dan untuk diktator (*government of dictator, by the dictator, and for the dictator*). Dan pengertian demokrasi tersebut adalah sesuai dengan arti demokrasi itu sendiri, di mana istilah demokrasi berasal dari bahasa Greek (Yunani), yaitu *demos* dan *kratos/kratein*. *Demos* artinya rakyat dan *kratos/kratein* artinya adalah memerintah. Secara umum maknanya adalah rakyat yang memerintah, atau pemerintahan rakyat.

**Suara rakyat = suara Tuhan?**

Sesungguhnya istilah *vox populi*,

\*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

*vox dei* tidak lebih dari sekedar mitos dan suatu kedustaan yang menyebarkan. Ada banyak alasan untuk menyatakan bahwa istilah *Vox populi, vox dei* adalah suatu kebohongan yang nyata, bahkan dia termasuk dalam katagori kebohongan publik (meminjam istilah kasus Buloggate). **Pertama**, yang berhak membuat hukum hanya Allah SWT, Tuhan yang menciptakan manusia, bukan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT: "*Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah*" (QS. *Al An'am* : 57). Juga firman-Nya: "*Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu*" (QS. *Al Maidah*: 48). Manusia tidak berhak untuk membuat hukum, bahkan salah satu tugas utama manusia di muka bumi ini adalah menegakkan hukum-hukum Allah SWT. Manusia harus tunduk, patuh dan taat terhadap segala keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, baik dalam kehidupan pribadi seperti ibadah dan akhlak, maupun dalam kehidupan bernegara seperti menjatuhkan hukum (pidana atau perdata), serta memberi keputusan atau kebijakan terhadap masalah ekonomi, politik, pemerintahan, militer dan sebagainya, semuanya harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan-aturan Allah SWT. Bagi

mereka yang melanggar aturan-aturan-Nya, Allah SWT mencap mereka sebagai orang yang kafir, zalim, dan fasik (lihat QS. *Al Ma'idah*: 44, 45 & 47), di mana mereka diancam dengan siksa dan azab yang sangat pedih dihari kiamat.

**Kedua**, rakyat bukan sebagai sumber kebenaran. Suatu kedustaan jika kebenaran diletakkan pada suara rakyat atau suara mayoritas, karena faktanya rakyat hanyalah sekumpulan manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Manusia adalah makhluk yang lemah dan bodoh. Dia tidak mengetahui secara meyakinkan akan hakikat dirinya sendiri. Dia juga tidak mengetahui mana yang baik dan buruk secara meyakinkan, juga tidak mengetahui kemaslahatan apa yang terbaik untuk dirinya, bahkan dia juga tidak mengetahui secara meyakinkan mana yang benar dan mana yang salah. Justru kebanyakan manusia adalah termasuk orang yang paling banyak berpaling dan menolak kebenaran, sebagaimana firman Allah SWT: "*kebanyakan mereka membenci kebenaran*" (QS. *al Mu'minin*: 70), juga dalam ayat yang lain disebutkan : "*Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui kebenaran sehingga mereka berpaling*" (QS. *al Anbiya*: 24).

Kebenaran sesungguhnya tidak bergantung pada banyaknya orang, melainkan bergantung pada sumber kebenarannya. Dan sumber kebenaran

yang hakiki, yang tidak dipersilahkan lagi adalah Allah SWT, Tuhannya manusia, Yang menciptakan dan memberi aturan serta petunjuk hidup untuk manusia. Firman Allah SWT: "*Keberanian itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu*" (QS. al Baqarah: 147).

**Ketiga**, sesungguhnya suara rakyat yang hakiki itu tidak pernah ada, yang ada hanyalah suara segelintir orang atau sekelompok orang yang mengklaim mewakili rakyat. Suatu hal yang mustahil dan tidak akan pernah terjadi jika rakyat secara keseluruhan mengeluarkan suara yang sama. Kenyataannya antara satu manusia dengan manusia yang lain, walaupun hidup dalam satu daerah atau negara yang sama, memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda. Hal ini bisa kita lihat pada sikap rakyat terhadap amandemen UUD 1945. sebagian orang, yang merupakan bagian dari rakyat mendukung amandemen, sedang sebagian lainnya menolak amandemen. Pro dan kontra juga terlihat pada saat Indonesia berhadapan dengan IMF, sebagian orang mendukung, sedang sebagian lainnya menolak.

Sikap yang sama juga terlihat pada saat menjatuhkan Soeharto, sebagian (besar) orang menginginkan Soeharto turun, sedang sebagian lainnya menolak atau abstain. Jadi bagaimana

mungkin dapat dikatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, sedang secara hakiki suara rakyat (bulat/menyeluruh) itu tidak pernah ada, yang ada hanyalah suara segelintir atau sekelompok orang. Dan sejak kapan Allah mewakilkan suara-Nya kepada segelintir atau sekelompok orang, bahkan tidak ada satu dalil atau khabar-pun yang memberitakan bahwa Allah SWT telah mewakilkan suara-Nya kepada rakyat secara menyeluruh atau sebagian.

### **Suara Mayoritas = Suara Rakyat?**

*Vox populi, vox dei* yang disandarkan pada sistem demokrasi kenyataannya adalah hanya disandarkan pada suara sebagian rakyat yang dianggap mayoritas, bukan suara seluruh rakyat. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa secara hakiki tidak ada suara rakyat secara menyeluruh, yang ada hanyalah suara segelintir atau sekelompok orang. Dalam sistem demokrasi semua orang berhak menentukan nasib mereka sendiri, mereka berhak untuk terlibat dalam urusan pemerintahan, dan mereka juga berhak untuk menentukan hukum serta sistem yang diberlakukan di tengah-tengah kehidupan mereka. Namun dikarenakan ketidakmungkinan melibatkan seluruh rakyat dalam menentukan hukum dan menjalankan pemerintahan, maka dikembangkanlah wacana demokrasi tidak langsung, di mana

rakyat memilih seseorang untuk mewakili suara dan kehendak mereka. Akibatnya secara riil dan hakiki yang mengontrol, mengendalikan dan menentukan pemerintahan (pemimpin) adalah sekelompok kecil orang yang telah ditunjuk sebagai wakil rakyat. Rakyat (banyak) tidak lagi dilibatkan dalam sistem tersebut. Justru yang berperan adalah sebagian kecil dari rakyat yang terpilih sebagai wakil rakyat.

Di parlemen (sebagai lembaga yang mewakili rakyat), dalam setiap pembahasan masalah dan hukum, secara riil tidak pernah melibatkan rakyat, bahkan meminta pendapatpun tidak. Kemudian secara riil kita juga melihat bahwa yang menjadi wakil rakyat adalah terdiri dari berbagai macam golongan atau kelompok atau utusan, yang masing-masing memiliki aspirasi dan tujuan yang berbeda. Sehingga yang paling banyak berperan, (besar) dalam menentukan hukum dan pemerintahan adalah kelompok yang paling banyak menduduki jabatan wakil rakyat di parlemen, sedangkan mereka yang terpilih sebagai wakil rakyat pada faktanya tidak mewakili rakyat secara mayoritas (apalagi secara keseluruhan), melainkan hanya mewakili sekelompok orang. Dengan demikian suara mayoritas pada faktanya hanyalah suara minoritas. Yang menguasai parlemen hanyalah sebagian kecil orang yang dianggap sebagai wakil

rakyat, dan yang menentukan hukum atau peraturan perundangan serta pemerintahan adalah suara minoritas yang terdapat dalam parlemen, bukan rakyat secara keseluruhan.

Salah satu kasus yang bisa kita lihat adalah jumlah wakil rakyat yang duduk di DPR/MPR RI, di mana PDIP yang memegang suara mayoritas di DPR/MPR hanya mengantongi suara sekitar 33 persen, sisanya sekitar 73 persen dibagi ke dalam beberapa kelompok partai. Ini berarti sekitar 73 persen (mayoritas) yang notabene tidak dikuasai PDIP ternyata bukan sebagai suara mayoritas yang mewakili rakyat (banyak). Jika kita mau jujur melihat bahwa sebagian besar rakyat (70 persen lebih) tidak menginginkan Megawati menjadi Presiden, namun karena mereka adalah mayoritas di parlemen (walaupun hanya mewakili sekitar 33 persen), maka mereka mampu mengalahkan suara rakyat banyak.

Di pemerintahan lebih parah lagi. Banyak keputusan yang dikeluarkan pemerintah tidak melibatkan lembaga wakil rakyat (apalagi rakyat secara langsung). Dari sejumlah peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah, hanya UU saja yang melibatkan parlemen, selebihnya dikeluarkan secara mandiri tanpa keterlibatan parlemen. Padahal peraturan yang paling banyak bersentuhan langsung dengan rakyat

adalah peraturan pelaksana yang diwakili oleh PP, Kepres, dan Inpres, bukan UU. Namun semua itu tetap dibenarkan (dimaklumi), karena inilah demokrasi. Rakyat yang seharusnya terlibat dalam pemerintahan ternyata tidak terlibat, bahkan pemerintah yang diharapkan dapat memperbaiki kehidupan mereka justru membikin sulit kehidupannya.

Berdasar pada kenyataan tersebut adalah suatu kebodohan dan kedustaan jika kita tetap mengatakan dan mengagungkan kata *Vox populi, vox dei*. Seharusnya kita mengatakan *Vox populi, vox dei* adalah dusta, karena pengakuan dan membenaran pernyataan ini dapat menjerumuskan kita dalam kesesatan, yakni telah menempatkan manusia (rakyat) layaknya Tuhan, bahkan (mungkin) telah meng-

gantikan posisi Tuhan. Dan Allah SWT telah mengingatkan kita : "*Jika kamu menuruti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari falan Allah*" (QS. al An'am: 116). Jargon Suara rakyat adalah suara Tuhan hanyalah ilusi dan mitos untuk memalingkan manusia dari kebenaran hakiki. Demikian pula dengan jargon suara mayoritas adalah suara rakyat tidak lain hanyalah kedustaan untuk menutupi dan melindungi demokrasi yang rusak. Oleh karenanya sudah sepantasnya kita meninggalkan dan membuang jauh-jauh prinsip *Vox populi, vox dei* sebagai alat pembenar dalam mewujudkan keinginan kita. *Vox populi, vox dei* tidak lebih dari sekedar mitos dan kedustaan.



**PT. LIA CENTRAL UTAMA**  
PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA  
**DOMESTIC & INTERNATIONAL LABOUR AGENT**



MEMBANGUN  
MANUSIA KARYAJl. Gambir Anom Krajan Rt. 03/02 Ngrupit - Ponorogo Jawa Timur 63492  
Telp/Fax. 531301-484951KANTOR CABANG

INFORMASI - PENGEMBANGAN & PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM & KELUAR NEGERI

*Mengucapkan :*

*Selamat Hari Raya Idul Fitri 1423 H*

*Minal Aidhin Walha'izhin*

*Mohon Maaf Lahir dan Batin*